BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Melalui uraian – uraian yang tertuang dalam bab pembahasan sebagai jawaban atas permasalahan yang timbul pada penulisan skripsi ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa perlu dilakukannya pengembalian urusan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam bidang sumber daya alam mineral dan batubara, khususnya dalam urusan tambang batubara sebagaimana yang tertuang dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 dan UU Pemerintah Daerah. Dengan alasan bahwa wilayah pertambangan tentunya berada dan berlokasi di daerah provinsi dan kabupaten/kota yang merupakan “hak milik” dari setiap daerah yang memilikinya sehingga pengelolaan pertambangan seharusnya juga menjadi urusan pemerintahan daerah, mengingat hasil usaha pertambangan yang menjadi pendapatan asli daerah menyumbang angka yang cukup bagi pemasukan di setiap daerah. Dengan kata lain aktivitas pertambangan mempunyai nilai positif dari sisi ekonomi terkhusus di daerah penghasil. Daerah dapat menarik pendapatan dari landrent atau semacam pajak atas tanah, royalti (pajak atas produksi). Namun kerugian lain yang dialami oleh pemerintah daerah ketika izin usaha pertambangan tersebut menjadi kewenangan pusat, maka pemerintah daerah tidak akan dilibatkan dalam pengawasan pertambangan yang berada di daerah itu sendiri tentunya hal ini akan menimbulkan polemik tersendiri pada daerah penghasil.
2. Pentingnya dikembalikannya urusan pemerintah pusat kepada pemerintah

daerah dalam rangka agar terciptanya harmonisasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat sehingga tidak terjadi ketegangan dan setiap daerah yang memiliki sumber daya alam batubara tidak meminta merdeka atau lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka Penulis dapat memberikan saran – saran yaitu kepada Pemerintah, dalam rangka mengembalikan kewenangan pemerintahan daerah terkait pengelolaan pertambangan mineral dan batubara agar sesuai dengan amanat Pasal 18 dan Pasal 18A UUD NRI Tahun 1945 maka harus ada perbaikan di dalam UU No.3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, oleh sebab itu penulis menyarankan kepada pihak yang berwenang yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk melakukan perubahan terhadap UU No. 3 Tahun 2020 dengan menyiratkan secara tegas dan mengembalikan kewenangan pemerntahan daerah dalam hal pengelolaan pertambangan mineral dan batubara khususnya di sektor tambang batubara.